

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaron, Thomas J., 1964, *The Control of Policy Discretion*, Charles C. Thomas Co., Springfield.
- Adji, Oemar Seno, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Binacipta, Bandung
- Ashiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Bandung.
- _____, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Menelaah Lika-Liku Rancangan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.

- Darumurti, Krishna Djaya, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- De Smith, A. A., 1985, *Constitutional and Administrative Law*, Penguin Books, London.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dicey, A. V., 2008, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Terjemahan)*, Nusamedia, Bandung.
- Fatovic, Clement, 2009, *Outside the Law: Emergency and Executive Power*, The John Hopkins University Press, Maryland.
- Garner, Bryam A., 1979, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Group, USA.
- Hadjon, Philipus M., 2005, *Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M., et.al, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persafa, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2019, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1999, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor.

- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Kamis, Margarito, 2014, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi*, Setara Press, Malang.
- _____, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- Klitgaard, Robert, 1988, *Controlling Corruption*, University of California Press, Berkeley.
- Koentjaraningrat, 1984, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Halim, 20014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1983, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2016, *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Manan, Bagir, 1996, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- _____, 1996, *Politik Perundang undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung.
- _____, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Marbun, S. F., et. al, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Marbun, S. F. dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrosi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Mutiar'as, 1990, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta.
- Patiro, Yopi Morya Immanuel, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Bandung.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2016, *Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Hukum Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta.

- Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011, *Pedoman Peneraoan Reformasi Regulasi*, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Saputra, M. Nata, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Simorangkir, J.C,T, et. al, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.
- Soetami, A. Siti, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

_____, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wati, Agustina, et. al, 2019, *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, Pustaka Horizon, Samarinda.

Yamin, M., 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Yulikhsan, Eri, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, Deepublish, Yogyakarta.

Jurnal

Alamsyah, T.M. Taufik, “Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, *Juristek*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2013.

Anggono, Bayu Dwi, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Busroh, Firman Freaddy, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2 Agustus 2017.

Daramurti, Krishna Djaya, “Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2014.

Djafar, Wahyudi, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volumen 7, Nomor 5, Oktober 2010

Elviandri, et. al, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.

Endang, M. Ikbar Andi, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Menurut Undang-undanga Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Agsutus 2018.

- Ginting, Yuni Priskila, “Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja”, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.
- Hartanto, Heri, “Pertanggung Jawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, *Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 3 Desember 2016.
- Hayyu, Pradany, “Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha”, *Mediakeuangan*, Volume 13 Nomor 128 Mei 2018.
- Kurniawaty, Yuniar, “Penggunaan Diskresi Dalam Pembuatan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 11, Maret 2016.
- Marzuki, M. Laica, “Menyoal Diskresi yang terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Amanna Gappa*. Volume 25 Nomor 2, September 2017
- Mayasari, Ima, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Mubarok, “Diskresi dan Kaitannya Dengan Ijtihad”, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Volume 1 Juni 2009.
- Muhlizi, Arfan Faiz, “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, April 2012.
- Muhsin, Mustika Sari, “Kajian Yuridisi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Lex Administratum*, Volume VII Nomor 3, September 2019.
- Nurmayani dan Mery Farida, “Problematisasi Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Pamungkas, M. Ro'i Adhi dan Budi Ispriyarso, “Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 1 Mei 2020.

- Prasetyo, Teguh, "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010
- Rusnan, "Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freis Ermessen Dalam Welfare State", *Jurnal Ius*, Volume 2 Nomor 4, April 2014.
- Sanusi, Arsyad, "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Juli 2009.
- Subadi dan Tiara Oliviarizky Toersina, "Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah." *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30 Nomor 1, Februari 2018
- Sunstein, Cass R., "Problems with Rules", *California Law Review*, Volume 83 Nomor 4, Juli 1995.
- Tamanaha, Brian Z., "The History and Elements of The Rule Of Law", *Singapore Journal of Legal Studies*, February, 2012.
- Wijaya, "Kewenangan Diskresi Mengenai Peluang Sikap Tindak Administrasi Negara dalam Pemberdayaan Hukum Progresif", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 2, April 2020.
- Wuisang, Ari, "Tanggungugat Publik Terhadap Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan", *Pakuan Law Review*, Volume 07, Nomor 02 Juli-Desember 2021

Makalah

- Attamimi, A. Hamid S., "Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Persepektifnyaa Menurut Pancasila dan UUD 1945", Makalah pada Seminar Sehari dalam *Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994
- Hadjon, Philpus M., "Discretionary Power dan Asas-Asas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB), Makalah Disampaikan Dalam *Seminar Nasional Aspek Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep*, Semarang, 6-7 Mei 2004

Marzuki, Laica, “Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Hakekat serta Fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan”, Makalah Disampaikan dalam Rangka *Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 26-31 Agustus 1996.

Internet

Ihfa Firdausya, “Pengamat: Lima Arah Strategis Presiden Jokowi Amat Tepat”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/266605/pengamat-lima-arahan-strategis-presiden-jokowi-amat-tepat>, pada 4 Maret 2021.

Abdul Razak, “Hakikat Peraturan Kebijakan”, Negara Hukum, di akses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/hakikat-peraturan-kebijakan.html> pada 28 September 2021.

The World Bank, “Ease of Doing Business Rankings”, diakses melalui <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, pada tanggal 22 September 2021.

Tempo, “Sulitnya Berinvestasi di Indonesia”, diakses melalui <http://www.kolom.tempo.co/read/1143060/sulitnya-berinvestasidi-indonesia> pada tanggal 15 Februari 2020.

World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019”, diakses melalui http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf pada tanggal 15 Februari 2020.

Zainal Arifin Mochtar, “Pemerintahan dan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/kolompakar/295205/pemerintahan-dan-ruu-cipta-kerja>, pada tanggal 12 November 2021.

Bivitiri Susanti, “Seri Diskusi Omnibus Law Vol. 7: Problem Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Cipta Kerja”, diakses melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/webinar-seri-diskusi-omnibus-vol-7-problem-birokrasi-dan-administrasi-pemerintahan-dalam-ruu-cipta-kerja/>, pada tanggal 12 November 2021.

Kementrian Informasi dan Komunikasi, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentangpemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers, pada 18 Oktober 2021.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Tulisan Ilmiah Lainnya

Akbar, Muhammad Taufik, 2019, *Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Hubungannya Dengan Penyalahgunaan Kewenangan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Alkalingga, Muhammad Farodi, 2018, *Prosedur Penggunaan Diskresi Berdasarkan Stagnansi Pemerintahan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Djamiati, Tatiek Sri, 2007, “Perizinan sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik”, Orasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Fakhrurrozi, Muhammad, 2021, *Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2013, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Hurint, Arlian Belawa, 2017, *Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Indroharto, 1992, “Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata”, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Indonesia, Jakarta.

Kurniawan, Ade, 2016, *Penerapan Diskresi Oleh Presiden Dalam Kasus Pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/PHB/2015 tentang Larangan*

Ojek Online, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta

Kurniawan, Teguh, 2017, *Isu Diskresi Dalam Kasus Korupsi Kepala Daerah Yang Ditangani Oleh KPK Pada Periode 2004-2010 dan Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lukman, Marcus, 1989, *Freis Ermessen Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana di Kotamadya Pontaian*, Tesis, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.

_____, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Marbun, S .F., 2001, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung

Murti, Krishna Djaya, 2011, *Dasar-dasar Pengujian Terhadap Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Yogyakarta.

Mutalib, Muhammad Thabrani, 2017, *Kewenangan Pengadilan Menguji Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Permana, Tri Cahya Indra, 2009, *Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Purba, Muhammad Arief Muhtadin, 2017, *Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2016*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rismayanti, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah Covid-19*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Riyanto, Sigit, et. al, 2020, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taufiqurrahman, Mhd., 2019, *Rekonstruksi Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 34)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)/Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183)

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakah Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Nomor Pengadilan Tata Usaha Negara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Minggu 22 September 2020.

Artikel Koran

Hendry Julioian Noor, “Fiktif Positf dan Diskresi Pasca Undang-undanga Cipta Kerja”, dalam Harian Kompas diterbitkan pada 06 April 2021